

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, menyebabkan adanya perubahan dalam budaya organisasi. Organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi dan bersaing dalam memberikan layanan terbaik. Tuntutan tersebut bukan hanya diberikan kepada pihak swasta tapi juga pada instansi pemerintah. Semua organisasi atau semua lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik dituntut untuk terus memperbaiki kinerja untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanannya yang terbaik untuk masyarakat.

Pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintah harus diberikan dengan prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit sehingga biaya yang dikeluarkan terjangkau atau sebanding dengan layanan yang dinikmati. Dalam memberikan layanan instansi pemerintah tidak memiliki orientasi pada keuntungan semata. Ini tentu berbeda dengan pihak swasta yang tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Karena tujuan inilah, muncul tuntutan untuk bersikap fleksibel pada sistem yang ada, birokrasi terkadang terkesan berbelit-belit dan menyulitkan. Hal ini akhirnya mendasari lahirnya suatu sistem baru yang memungkinkan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik bergerak bebas tapi tetap

sebagai bagian dari pemerintahan. Sistem baru inilah yang kini kita kenal sebagai pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU).

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam penyelenggaraan kegiatan BLU tidak mengutamakan dalam pencarian keuntungan semata. Namun BLU dapat melakukan pemungutan biaya kepada masyarakat sebagai bagian dari imbalan atas barang/jasa yang telah diberikan.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). BLU merupakan bentuk dari *New Public Management* (NPM). NPM merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam administrasi publik dengan penerapan pengetahuan dan pengalaman yang

diperoleh dalam manajemen bisnis atau disiplin ilmu lainnya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas kinerja dalam memberikan pelayanan publik modern.

Pengelolaan Keuangan BLU diatur dalam PP no 23 tahun 2005 yang telah di ubah dalam PP No 74 Tahun 2012 bahwa dalam pengelolaan kegiatan perencanaan BLU mencakup penyusunan rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) dan juga menyusun Rencana Bisnis Anggaran tahunan yang mengacu pada strategi bisnis 5 tahunan. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.

Di samping dari perencanaan yang mengacu pada anggaran berbasis partisipatif, pelaksanaan proses juga penting dalam pengelolaan keuangan di BLU. Proses pelaksanaan mencakup dari pengelolaan kas, pengelolaan piutang, pengelolaan utang, pengadaan barang, pengelolaan barang. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan pada praktek bisnis yang sehat. Dimana penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan manajemen berkesinambungan.

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLU hasil monev 2015-2016 ada beberapa kendala teknis yang berulang terjadi yaitu dari segi penganggaran, banyak dari BLU yang sudah terbentuk tidak melaksanakan penganggaran sesuai dengan ketentuan. Dari proses pelaksanaan

misalnya kurangnya mengoptimalkan *asset* tetap dalam rangka mengoptimalkan proses *Revenue Generating Activity*. Dari segi evaluasi, transparansi dan akuntabilitas yang masih perlu untuk dibenahi.

Beberapa kasus yang menjadi perhatian pengelolaan keuangan yang tidak sesuai antara lain seperti yang terjadi pada Universitas Bengkulu di mana terjadi penggelapan dana oleh bendahara Pengeluaran. Selain itu terjadi selisih pencatatan kas yang terjadi antara BLU UNMUL dan BLU UNUD dengan KPPN pada masing-masing wilayah. Menurut penelitian Nadilla dkk (**Tahun 2015 , 2016**) dalam jurnal *Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* menjelaskan bahwa BLU tidak mampu menyajikan informasi akuntansi yang komprehensif karena laporan keuangan dihasilkan dari basis yang berbeda pelaporan keuangan berbasis akrual sementara anggaran berbasis kas, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang mumpuni dan kurangnya komitmen manajemen untuk menerapkan konsep BLU sebagai entitas bisnis.

Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2014) yang mengungkapkan bahwa PPK BLU belum berjalan secara efektif karena tarik menarik kepentingan antar pelaku kebijakan yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, dan Satuan Kerja (Satker) BLU; konten PPK BLU yang kurang memperhatikan prinsip fleksibilitas dan kemudahan bagi BLU; serta lingkungan pemerintahan yang menunjukkan kuatnya kultur birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan secara konsisten melaksanakan prosedur keuangan dengan rujukan pada peraturan yang berlaku umum bagi satuan kerja instansi pemerintah

Di tengah banyaknya permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan BLU maka hal yang menarik untuk diteliti terkait pelaksanaan BLU di Polinema. Polinema dipilih sebagai obyek penelitian karena Politeknik Negeri Malang (Polinema) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berstatus BLU yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.05/2012 tentang Penetapan Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sejak tanggal 24 Februari 2012. Polinema merupakan PTN berbasis vokasi pertama dan satu-satunya yang berstatus BLU di Indonesia. Polinema di sebut sebagai pelopor Perguruan Tinggi Negeri dengan status BLU.

Polinema telah berubah menjadi BLU sejak 2012, sudah meningkatkan pendapatan BLU dari Rp.29,802 juta rupiah menjadi Rp 129,211 juta rupiah dan pada tahun 2018 dengan mahasiswa sebanyak lebih kurang 10 ribu mahasiswa. Sedangkan, anggaran yang dikelola Polinema sebelum menjadi BLU adalah Rp 26 Milyard, namun setelah menjadi BLU anggaran yang dikelola Polinema menjadi Rp 118 Milyard. Selain di kampus utama, Polinema juga mengelola tujuh Program Studi Di Luar Domisili yang berada pada tujuh kabupaten yaitu : Blitar, Bojonegoro, Jepara, Trenggalek, Lumajang, Taliwang, dan Pamekasan, di mana dua PDD Trenggalek dan Taliwang saat ini sudah tidak aktive dan satu PDD Blitar yang sudah berdiri sendiri menjadi Akademi Komunitas Negeri Putera Sang Fajar di Kabupaten Blitar.

Peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi konsekuensi logis yang harus diwujudkan oleh Politeknik Negeri Malang dengan besarnya anggaran yang dikelola tersebut dan banyaknya unit kerja yang berada di bawah pengelolaan Polinema. Polinema harus mampu mengimplementasikan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memaksimalkan potensi Polinema dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Sebagai PT Vokasi pertama yang telah 7 tahun menyandang status BLU harus bisa menjadi *role model* atau rujukan dalam implementasi pengelolaan keuangan BLU. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum di Politeknik Negeri Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Politeknik Negeri Malang”

1.3 Tujuan Penelitian

Rumusan penelitian memberikan arah pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Politeknik Negeri Malang”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, manfaat penelitian ini terurai sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bahan informasi di bidang akuntansi. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang serupa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian terutama bagi Polinema. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau rekomendasi yang berguna dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi dan dalam mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sebagai penyedia layanan Pendidikan Tinggi